

KAJIAN MODEL INTERNALISASI IDEOLOGI KEBANGSAAN DI DAERAH PERBATASAN

M.Mas'ud Said*

*Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)

Abstract :

Research on Indonesia's national ideology as a glue of national identity, has been one of the most interesting theme in the study of modern Indonesia. Due to its geographical condition, maintaining natinalism of the people living in the border area is one of the changes of Indonesian government. The mode of internalization of national ideology is needed. This research describes about the common problems faced by people living in the borders areas and the need of searching and development of a mode of internalization of Indonesia's national ideology. This research found that in general, the people's feelings to be Indonesian are well mainatined and surprisingly fertilyzed naturally. However, new form of internalization of natinal ideology needed to be organized and applied in the border area to prevent centiments and eradication of national identity. This study examines the existing condition in the three borders areas: (1) NTT - Timor Timur, (2) Papua - PNG and (3). Kalimantan Barat, Kab. Sanggau - Malaysia. To gather data and information, visit to the border of Sanggau - Entikong was taken place in November 2009. Intensive visit, Interviews, focus group discussion, questionnaires are employed in this study.

Abstrak :

Penelitian tentang ideologi nasional Indonesia sebagai perekat identitas nasional, telah menjadi salah satu tema yang paling menarik dalam studi Indonesia modern. Karena kondisi geografis, mempertahankan nasionalisme dari masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan merupakan salah satu perubahan dari pemerintah Indonesia. Model internalisasi ideologi nasional sangat diperlukan. Penelitian ini menjelaskan tentang masalah yang umum dihadapi oleh orang-orang yang tinggal di daerah perbatasan dan kebutuhan pencarian dan pengembangan model internalisasi ideologi nasional Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum, perasaan rakyat untuk menjadi bagian dari sangat sensitive dan cenderung absolut secara alami. Namun, bentuk baru internalisasi ideologi nasional perlu diatur dan diterapkan di daerah perbatasan untuk mencegah sentimen dan pemberantasan identitas nasional. Studi ini mengevaluasi kondisi yang ada di tiga wilayah perbatasan: (1) NTT - Timor Timur, (2) Papua - (3) PNG dan. Kalimantan Barat, Kab. Sanggau (Kecamatan Entikong) - Malaysia. Untuk mengumpulkan data dan informasi, penulis melakukan kunjungan ke perbatasan Sanggau - Entikong itu terjadi pada November 2009. Kunjungan intensif, Wawancara, focus group discussion, dan kuesioner adalah metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Keywords: *Nationalism, Nationality, Border Area*

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sering menghadapi persoalan krusial dalam menjaga integrasi bangsa. Integrasi adalah keadaan harmoni antara anggota-anggota dalam masyarakat (Maurice Duverger; 1993). Dalam konteks politik kenegaraan, keadaan seperti ini menuntut kemampuan pemerintah menghilangkan pelbagai bentuk antagonisme dan pergolakan yang dapat mengancam keutuhan masyarakat bangsa.

Bahwa sebuah bangsa terwujud dan kuat apabila memiliki syarat apa yang disebut oleh Soekarno – mengikuti pendapat Ernest Renan – “*le desire d’etre ensemble*” atau kehendak akan bersatu. Soekarno

mengingatikan syarat pendirian suatu bangsa yang didasarkan pada keinginan yang kuat dari setiap elemen masyarakat untuk bersatu. Dalam konteks kelangsungan bangsa, sangatlah penting apa yang disebut dengan ‘mitos integrasi total’, yakni kesempurnaan keadaan harmonis tanpa konflik atau antagonisme, di mana setiap individu melebur dalam suatu komunitas yang lebih besar. Harmoni dalam keadaan yang sempurna, tidak ada antagonisme atau konflik, sulit diwujudkan tanpa design integrasi bangsa.

Integrasi menurut Benedick Anderson – merupakan kondisi masyarakat yang dibayangkan (*imagined community*) oleh para bapak pendiri bangsa (*the founding fathers*). Pembahasan tentang integrasi memiliki relevansi dengan kondisi kontemporer Indonesia masa kini ditengah ancaman laten dis integrasi.

Selanjutnya dalam buku kajian yang mendalam, Ian Chalmers mencatat bahwa setidaknya sampai pada masa akhir akhir ini, masih terdapat gejala fragmentasi dan ancaman terhadap bentuk negara kesatuan. Dikemukakan bahwa Indonesia kini sedang menghadapi apa yang ia sebut sebagai ancaman fragmentasi. Bahkan ia menyebut kondisi kekinian itu akan bisa menentukan kelanjutan dan masa depan bentuk negara kesatuan. Berikut ini petikan studinya “*an associated rise in the regional sentiments and more strident assertions of the regional identity have threatened the very future of the unitary republic; some have predicted that the country will fragment as some of its component provinces seek independence.*” (Chalmers, 2006, p. 31)

PEMBAHASAN

IDEOLOGI KEBANGSAAN

Ideologi bisa dikatakan sebagai paham, ide, atau pemikiran. Dengan pengertian seperti ini, semua orang pada dasarnya mempunyai ideologi. Tetapi konteks penggunaan istilah ideologi tidak sesederhana dalam pengertian tersebut. Mengikuti konseptualisasi ideologi dari John B. Thompson, istilah ideologi sering digunakan dalam dua cara. Cara pertama, ideologi digunakan dalam konsepsi yang netral (*neutral conception*). Dengan cara ini, ideologi dipahami tidak lebih dari sekedar sebagai sistem berpikir, sistem kepercayaan, praktik-praktik simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik. Cara kedua dengan memahami ideologi secara kritis yang disebut dengan *critical conception of ideology*. Dalam konsepsi kritis, ideologi selalu dikaitkan praktik relasi kekuasaan asimetris dan dominasi kelas (John B. Thompson, 2003).

Istilah ideologi pertama tama diperkenalkan oleh Destutt de Tracy pada tahun 1796. De Tracy menggunakan istilah ideologi dengan maksud memberi nama terhadap ilmu dia rancang yaitu tentang ide dan sensasi, tentang makna turunannya, kombinasinya dan akibat yang ditimbulkannya. De Tracy mempunyai pandangan bahwa, pengetahuan manusia terhadap benda tidak diperoleh secara langsung dari benda itu sendiri, tetapi hanya melalui ide-ide yang terbentuk berdasarkan sensasi seseorang terhadap benda-benda tersebut.

Dalam pandangan de Tracy, untuk menganalisis ide dan sensasi secara sistematis, dibutuhkan suatu disiplin ilmu pengetahuan ilmiah yang kuat dan dapat menarik kesimpulan secara lebih praktis. De Tracy mengusulkan nama pengetahuan ilmiah yang dimaksud dengan ideologi – ilmu tentang ide. Pada zaman de Tracy penggunaan istilah ideologi tetap konsisten di jalur keilmuan meskipun de Tracy menyadari adanya kemungkinan ideologi bisa masuk kepada wilayah sosial politik

Ideologi telah menjadi bagian penting dalam menentukan identitas bersama dan dalam menentukan tindakan bersama. Dengan demikian ideology diartikan *pertama* sebagai Struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya; *kedua*, Orientasi dasar yang membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia; *ketiga*, Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak; *keempat* Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya; dan *keempat* adalah sebagai Kekuatan yang mampu memberi semangat dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.

FENOMENA TERGERUSNYA IDEOLOGI KEBANGSAAN

Dalam laporan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Widodo A.S dalam rapat Kerja dengan

Komisi I DPR, 2 Maret 2009 dikemukakan bahwa beberapa langkah pengamanan dan pengelolaan wilayah perbatasan secara geopolitik dan pendekatan geoekonomi, yaitu terjaminan tegaknya hukum dan kedaulatan serta pembangunan ekonomi dan sosial sebagai perwujudan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Upaya upaya mendasar mengenai tema ini memunculkan kesimpulan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius, baik internal maupun eksternal, dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika pada 1 Juni 1945 Soekarno mengingatkan ungkapan Ernest Renan, akhir-akhir ini, Indonesia menghadapi keadaan terbalik atau paradoks dari ungkapan Ernest Renan, yakni "kehendak akan berpisah".

Beberapa wilayah Indonesia setelah berakhirnya Orde Baru harus terhapus dari peta NKRI setelah memisahkan diri dari Indonesia. Yang pertama adalah Timor Timur atau Timor Leste. Wilayah ini merupakan propinsi ke-27 setelah pada 1976 berintegrasi dengan Indonesia. Tetapi pada 20 Mei 2002 Timor Leste menyatakan diri sebagai negara merdeka dan lepas dari NKRI.

Setelah Timor Timur, pada 17 Desember 2002, *International Court of Justice* atau Mahkamah Internasional memenangkan gugatan Malaysia atau Sipadan dan Ligitan. Sejak itu, kedua pulau terluar itu harus lepas dari NKRI. Setelah menghadapi dua kasus besar tersebut, Indonesia terus-menerus dihadapkan pada tantangan dan ancaman terhadap yurisdiksi dan *soverignity* NKRI, baik yang dipicu oleh pihak luar (eksternal/negara lain), maupun dari pihak "elemen bangsa" Indonesia yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sampai saat ini, Indonesia sering terlibat pertentangan dengan Malaysia terkait dengan status Ambalat yang terletak di laut Sulawesi yang kaya dengan minyak mentah. Ambalat hanyalah salah satu wilayah di perbatasan yang berpotensi mengganggu integrasi NKRI, karena menurut Akhmad Solihin (Sinar Harapan, 10 Mei 2004), Indonesia masih mempunyai permasalahan sengketa perbatasan yang

belum terselesaikan dengan 10 negara tetangga.

Berikut analisis Akhmat Solihin, Indonesia mempunyai permasalahan "sengketa" perbatasan yang belum terselesaikan dengan 10 negara tetangga. Di antaranya: Indonesia dan Australia yang telah menyepakati batas bersama ZEE, namun hingga saat ini belum meratifikasi. Aktivitas penambangan pasir laut berdampak mengkhawatirkan pada keberadaan Pulau Nipah sebagai titik dasar dalam penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Singapura. Masalah perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia di perairan sebelah Pulau Sebatik masih berlarut-larut, ditambah dengan masalah perairan di sekitar Pulau Sipadan-Ligitan pasca-Sidang International Court and Justice (ICJ) tanggal 17 Desember 2002. Juga masalah penetapan ZEE di Perairan Selatan Laut Andaman antara Indonesia dan Thailand. Lalu masalah dengan Filipina yang lebih suka menggunakan Treaty of Paris 1889 ketimbang UNCLOS 1982, sehingga Pulau Miangas masuk ke wilayah Filipina. Permasalahan batas RI - Timor Leste pun belum tuntas.

Temuan Arif Suprpto (2008) memperkuat kekhawatiran peneliti terdahulu lainnya. Indonesia akan mudah terperangkap dalam permasalahan dengan negara tetangga jika tidak segera melakukan penataan dan pengelolaan terhadap wilayah perbatasan yang dimiliki. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 km, Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim).

Secara kepulauan wilayah Republik Indonesia, berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut, Indonesia, analisis Arif Suprpto lebih lanjut, berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan PNG.

Selain ancaman dari pihak luar terhadap keberlangsungan integrasi NKRI, yang perlu diperhatikan adalah kondisi masyarakat atau warga negara Indonesia (WNI)

yang mendiami wilayah perbatasan. Dari segi demografis, menurut Lukman Edy (www.lukman-edy.web.id), jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan per akhkir tahun 2006 sebanyak 4,4 juta jiwa atau rata-rata per kabupaten perbatasan sekitar 174.018 jiwa.

Kendati relatif sedikit jika di bandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah lainnya, penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian karena kondisi sosial ekonomi mereka pada umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi seperti ini jelas tidak menguntungkan bagi pemeliharaan integrasi karena adanya kecenderungan psikologis dari masyarakat untuk membandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat di negara tetangga yang relatif lebih makmur.

Disparitas ekonomi, baik dengan masyarakat di negara tetangga, maupun dengan masyarakat di wilayah Indonesia lainnya, mudah menimbulkan apa yang disebut oleh Ted Robert Gurr (1970) dengan *relative deprivation* (deprivasi relatif). Konsep dari Ted Robert Gurr ini biasanya digunakan untuk menjelaskan terjadinya konflik dan kekerasan baik yang bersifat vertikal (massa dengan elite atau negara) maupun horizontal (massa dengan massa). Dengan mengacu pada konsep deprivasi relatif, konflik dan kekerasan dipahami sebagai konsekuensi dari kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat antara ekspektasi terhadap kondisi kehidupan tertentu dengan kenyataan sesungguhnya.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, masyarakat di perbatasan, misalnya, memiliki ekspektasi agar kehidupan ekonominya tidak jauh berbeda dengan warga negara Indonesia di kawasan lainnya. Tetapi ekspektasi ini tidak bisa dipenuhi karena—setidaknya menurut masyarakat yang mengalami kondisi deprivasi relatif—pemerintah dinilai tidak menaruh kepedulian terhadap mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka lalu memilih jalan konflik terhadap pihak-pihak yang dinilai menciptakan kondisi deprivasi relatif.

Perkembangan yang paling mengkhawatirkan yang patut diperhatikan oleh pe-

megang kebijakan di Indonesia dari kondisi deprivasi relatif adalah keinginan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*), dan berpisah dari NKRI. Sebagai negara kepulauan dan sekaligus negara berkembang yang terus-menerus dihadapkan dengan persoalan ekonomi, Indonesia telah lama dihadapkan dengan isu *self-determination*.

Pada tingkat global, seperti yang ditunjukkan oleh kajian yang dilakukan Syamsul Hadi, dkk. (2006), beberapa negara yang tidak bisa menyelesaikan konflik internal yang pada akhirnya berujung dengan disintegrasi seperti yang terjadi di Yugoslavia. Menurut analisis Syamsul Hadi, dkk., terjadinya disintegrasi, antara lain, disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam mengelola kemajemukan etnisitas yang juga bertali-temali dengan persoalan disparitas ekonomi.

INTERNALISASI IDEOLOGI KEBANGSAAN

Karena Indonesia memiliki beragam etnis, ditambah dengan adanya disparitas ekonomi, maka wajar jika konflik dan kekerasan juga terjadi. Sejumlah penelitian—antara lain Lambang Trijono, dkk. (2004a, 2004b), Riza Sihbudi, dkk. (2001), dan Syafuan Rozi, dkk. (2006)—menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu akar konflik dan kekerasan internal (massa *versus* massa dan massa *versus* negara) adalah kondisi disparitas ekonomi.

Pada kasus kemiskinan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan, kendati (kemiskinan) tidak atau belum memicu aksi konflik dan kekerasan, setidaknya mengalami keterpecahan kepribadian (*split personality*) sebagai warga negara Indonesia. Dalam kajian antropologi terdapat istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena keterpecahan kepribadian yang (mungkin) dialami oleh sebagian warga negara Indonesia di wilayah perbatasan, yakni liminalitas dari Victor Turner (Y.W. Wartaya Winangun, 1990), suatu kondisi kejiwaan “tidak di sana dan tidak di sini”.

Perasaan tidak disana dan tidak disini itu akan mudah dialami oleh warga negara Indonesia di wilayah perbatasan jika negara tidak mampu melakukan—langkah “*reaggregation*” atau pengintegrasian kembali masyarakat ke dalam wilayah Indonesia, tidak saja dalam arti geografis, tetapi juga ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini Ian Chalmers, 2006 menyebutkan “*Third, an associated rise in the regional sentiments and more strident assertions of the regional identity have threatened the very future of the unitary republic; some have predicted that the country will fragment as some of its component provinces seek independence.*”

Salah satu studi signifikan mengenai masalah perbatasan ialah studi yang telah dilakukan tahun 2008 oleh Tim yang dibentuk oleh Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika guna mengidentifikasi isu publik yang ada di kawasan perbatasan dan menyusun rekomendasi kebijakan penanganan permasalahan di daerah perbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dalam laporan tersebut dikemukakan bahwa - sebuah negara, atau state’s border, sebagaimana dikemukakan oleh Riwanto Tirtosudarmo, (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-LIPI) dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Dikatakan bahwa perbatasan selalu dijadikan atau menjadi wilayah perebutan antar negara, terutama dalam hal penentuan sepihak batas negara.

Tapal batas selalu mengikuti teori zero sum game, dimana penentuan sepihak dalam hal penentuan perbatasan akan mempengaruhi batas negara tetangganya. Dan kadang kadang penentuan wilayah ini dekat dengan kepentingan atau interest ekonomi, politik negara bertetangga. Eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin di lepaskan dan sejarah kelahiran - berakhirnya berbagai negara.

Laporan tersebut juga mengatakan bahwa perbatasan sebuah negara menunjukkan sesuatu yang kompleks. Penentuan tapal batas tidak hanya membelah etnisitas yang berbeda. Ia bahkan membelah etnis yang sama, karena adanya

sejarah kebangsaan yang berbeda oleh warga etnis yang sama.

“Perbatasan adalah konsep geografis spasial. Ia baru menjadi konsep sosial ketika kita berbicara tentang masyarakat yang menghuni atau melintasi daerah perbatasan. Sebagai konsep geografis, masalah perbatasan telah selesai ketika kedua negara yang memiliki wilayah perbatasan yang sama menyepakati batas-batas wilayah negaranya. Dalam pendekatan yang konvensional, daerah perbatasan terutama masih dipandang kacamata pertahanan keamanan suatu negara, atau dilihat sebagai sekedar daerah frontier yang masih harus dikembangkan secara ekonomi”. (Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatik; 2008)

Internalisasi ideologi dalam hal ini, perasaan sebagai orang Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan akan berperilaku sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan dalam proses ini negara dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah adalah salah satu penanggung jawab akan nasib warga di daerah perbatasan.

Negara (State) adalah institusi yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengatur masyarakat dimana didalamnya juga terdiri dari bagian bagian kecil yang menjadi obyek ‘yang diperintah’. Bagian bagian kecil itu dianggap telah menyerahkan kekuasaannya secara sukarela maupun karena hukum untuk mengambil keputusan. Sub sub sistem yang ada dalam negara harus mengikuti kesepakatan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Robert Dahl sebagaimana dikutip oleh kelompok ahli ilmu politik Hague, Harrop dan Breslin menulis “*The state refers to the authoritative decision making institutions for an entire society, to which all other groups, institutions and persons are legally subject. In other words, the state is legally supreme: the last resort, its authority is compulsory. The state is the ultimate regulator of the legitimate use of force within its territory*” (Dahl, 1984 dalam Hague dkk, 1993)

Peran negara dalam internalisasi ideologi kebangsaan penting untuk dikuatkan dalam hubungannya dengan hal ini

disebabkan dua alasan. Pertama, semua negara (birokrasi) harus memperhatikan rakyatnya, karena keberadaan dan arah masyarakat akan mengikuti aparatur negara dan selalu akan wajib mengikuti arah kebijakan dan arah politik negara.

Kedua, yang bertanggung jawab atas kinerja negara adalah birokrasi baik pusat maupun daerah. Begitu negara berdiri secara legal formal, maka birokrasi baru bekerja sesudah kelahirannya. Dalam ilmu negara dikenali dan diasumsikan bahwa birokrasi bekerja untuk negara. Birokrasi adalah alat negara dan pemerintahan dalam berbagai manajemen pemerintahan.

Sampai berabad-abad peralihan peradapan manusia dari dulu hingga sekarang, dunia ini hanyalah satu. Di dunia sekarang terdapat sederetan negara yang jumlahnya sampai 260 lebih, termasuk mereka yang belum menjadi anggota PBB. Dengan kata lain, semua orang baik di barat maupun di timur, baik hidup di kutub selatan maupun di kutub utara berinteraksi dengan otoritas negara dan terkait baik secara langsung maupun tidak dalam otoritas sebuah atau beberapa negara.

Walaupun seseorang tidak memiliki kewarganegaraan secara formal ataupun mereka yang memiliki berbagai kewarganegaraan toh dia hidup dalam lingkup negara. Ilmu yang mempelajari asal muasal, tujuan didirikannya negara dan prinsip-prinsip untuk mengatur manusia untuk hidup bersama dalam sebuah wilayah dan otoritas negara tertentu disebut ilmu negara.

Secara filosofis, sebagaimana dikemukakan oleh PJ Soewarno (2005?), negara merupakan pengertian yang cukup kompleks. Dalam pengertian hukum internasional imbuhnya negara adalah lembaga yang memiliki pemerintahan yang berdaulat, rakyat yang menjadi warga negara dan wilayah tempat berlakunya kedaulatan pemerintahan itu.

Lebih jauh lagi PJ Soewarno menjelaskan makna negara sebagai kondisi moral, negara merupakan sintesis antara kemerdekaan universal dan kemerdekaan

individual, maka negara yang baik bukan negara itu mempertahankan tertib hukum, tetapi karena mengusahakan penyatuan yang universal dan yang partikular. Dia mengatakan negara berkuasa kalau tidak menyeleweng dari prinsip-prinsip negara yang asli dengan kualitasnya sebagai negara kesejahteraan yang makmur baik material maupun absolut.

Penelitian P3U - BIP - Depkominfo, tahun 2006 menemukan bahwa Pembangunan kawasan perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek kedaulatan negara, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, serta pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional. Karena itu, ketahanan kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Kerap kali masyarakat yang berdiam di kawasan perbatasan dapat berhubungan langsung dengan masyarakat di negara tetangga tanpa melalui prosedur ketat. Lantaran jalur darat merupakan lalu lintas perdagangan tradisional yang sudah berlangsung lama dan kerap menjadi pilihan bagi sarana interaksi antar masyarakat.

Kini yang menjadi persoalan adalah, bagaimana menguatkan proses integrasi agar warga negara Indonesia di wilayah perbatasan tidak berada dalam kondisi liminalitas, apalagi memilih jalan konflik dan kekerasan? Dalam kajian akademik terdapat beberapa kajian yang dapat dijadikan bahan acuan, antara lain studi Maurice Duverger. Dalam salah satu bukunya, *The Study of Politics* (1972), Maurice Duverger menyebut empat langkah sistematis untuk melakukan politik integrasi, yakni *pertama*, Merumuskan aturan-aturan prosedur; *kedua* Mengorganisir pelayanan-pelayanan kolektif dan pola umum dari aktivitas sosial; *ketiga* Memberikan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*); dan *keempat* Mempergunakan kekuatan dalam menghadapi gerakan yang melawan hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian mendasar mengenai tema ini memunculkan kesimpulan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius, baik internal maupun eksternal, dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika pada 1 Juni 1945 Soekarno mengingatkan ungkapan Ernest Renan, akhir-akhir ini, Indonesia menghadapi keadaan terbalik atau paradoks dari ungkapan Ernest Renan, yakni "kehendak akan berpisah".

Menurut hasil investigasi lapangan, kehendak untuk bersatu seperti yang dikatakan Soekarno harus dilakukan secara holistik, namun juga mempertimbangkan karakteristik daerah yang bersangkutan, ini yang lalu kami sebut *Sebagai Model Internalisasi Contextual Approaches*.

Namun juga setidaknya terdapat lima aspek dasar yang harus diperhatikan dalam internalisasi Ideologi kebangsaan di wilayah perbatasan yaitu *pertama*, Peningkatan kesadaran berkebangsaan dengan implementasi program pengembangan dan peningkatan pendidikan politik kebangsaan, peningkatan kualitas kehidupan politik, pembangunan sistem pengaman perbatasan.

Kedua, Diperlukan forum yang sesuai dengan konteks geografis dan kultural. Forum itu mulai dari kepemilikan bendera merah putih, lagu Indonesia raya lewat RRI dan TV lokal yang bisa memupuk nasionalisme kebangsaan di perbatasan; *ketiga*, Dalam rangka implementasi internalisasi nilai kebangsaan diperlukan percepatan pembangunan perekonomian masyarakat perbatasan pembangunan sektor ekonomi kerakyatan, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan usaha investasi, pengembangan jaringan informasi yang bernuansa Indonesia; *keempat*, Pembangunan kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya masyarakat perbatasan, dengan fokus pada peningkatan kualitas intelektual, moral, etika dan kesehatan; *kelima*, Forum Kebangsaan perlu didukung oleh peningkatan kapasitas kawasan perbatasan dengan implementasi program penataan ruang perbatasan.

pembangunan pos penjagaan perbatasan yang representatif dengan fasilitas penunjang yang memadai.

Perkembangan yang paling mengkhawatirkan yang patut diperhatikan oleh pemegang kebijakan di Indonesia dari kondisi deprivasi relatif adalah keinginan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*), dan berpisah dari NKRI. Sebagai negara kepulauan dan sekaligus negara berkembang yang terus-menerus dihadapkan dengan persoalan ekonomi, Indonesia telah lama dihadapkan dengan isu *self-determination*.

Hal mendesak lain dapat dilakukan dengan menekankan pada dua hal penting untuk memperkuat proses integrasi, yakni *pertama*, konsensus ideologis dan kewilayahan; *kedua*, loyalitas pelbagai elemen politik terhadap NKRI. Melengkapi kedua kajian tersebut, perlu juga dikutip pendapat dari Jenderal Abdul Haris Nasution yang menekankan pada pendekatan ekonomi (keadilan dan kesejahteraan) di samping menggunakan pendekatan keamanan (militer).

Pada tingkat kebijakan, Indonesia telah memiliki setidaknya dua payung hukum untuk memperkuat proses integrasi, yakni: (1) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009); (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006). Pada peraturan pertama terdapat program pengembangan wilayah perbatasan yang bertujuan (1) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.

Rekomendasi

Persoalan Ideologi Kebangsaan bukan sesuatu yang berjalan dalam keadaan hampa, INTERNALISASI IDEOLOGI KEBANGSAAN, harus pola atau kerangka penanganan yang menyeluruh (*holistic*),

dan kerjasama yang efektif, yang dapat dimulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat Provinsi dan kabupaten. Pola INTERNALISASI seharusnya dijabarkan melalui penyusunan dari tingkat makro oleh lembaga yang ditunjuk presiden atau oleh kementerian Koordinator bidang Keamanan dan Menko Kesra, sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses yang partisipatif baik secara horisontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah

daerah terutama dengan masyarakat perbatasan.

Bagian paling penting dari proses yang partisipatif itu adalah mendengarkan apa saja yang menjadi harapan masyarakat. Rumitnya permasalahan kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI di sisi lain, telah memunculkan harapan baru bagi masyarakat perbatasan. Meskipun seringkali harapan baru ini mereka rajut dengan perasaan ketidakpastian (*Uncertainty*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Yayasan Indonesiatera.
- Apter, David E. 1987. *Politik Modernisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Babbie, earl. 1993. "Louis Althusser : Telaah Negara dan Ideologi", dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, ed. Tim Redaksi Driyakata. Jakarta : Gramedia.
- Wiswaloyo, Bambang. Dkk. (ed.). 2006. *menelusuri Batas Nusantara : Tinjauan Atas Empat Kawasan Perbatasan*. Jakarta: Pusat Pengelolaan Pendapatan Umum Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Duverger, Maurice. 1993. *Sosiologi Politik* (Penerjemah: Daniel Dhakidae). Jakarta: Rajawali Press.
- Gafur, Sutarmam. Dkk. 2006. *Membangun Transparansi Melalui Partisipasi Publik di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat "Kasus Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas"*. Pontianak. Universitas Tanjungpura dengan Kemitraan Jakarta dan Uni Eropa. Hal 87-101.
- Hadi, Syamsul, dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Cires-FISIP UI.
- Nashir, Headar. 2001. *Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- Hariadi. 2008. "Pengaturan Perbatasan RI-PNG: Perspektif Implementasi kebijakan", dalam *Kajian Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Vol. 13 No.4 Desember 2008*. Jakarta: P3DI.
- Heywood, Andrew. 1992. *Political Ideologies : An Introduction* (London : Macmillan Education Ltd.
- Ian Chalmers, 2006, "Indonesia: An Introduction To Contemporary Traditions", New York: Oxford University Press, page 97 of Chapter 3: Center and Region in the National Identity
- Irewati, Awani, dkk. 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, mataram, dan Sumbas*. Jakarta: Grasindo.
- Keraf, A. Sonny Keraf. 1996. *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kuntowijoyo. 1996. "Nilai-nilai Ideologi Pancasila", dalam *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, ed. Riza Noer Arfani. Jakarta: Rajawali Press.
- Larrain, Jorge. 1986. *Konsep Ideologi*. Yogyakarta: LKPSM.
- Magnis Suseno, Frans. 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Nuswantoro. 2001. *Matinya Ideologi*. Magelang: Indonesiatera.
- Neuman, W. Lawrence. 2007. *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches Second Edition*. Pearson and A.B. Boston.
- Partogi Nainggolan, Poltak. 2009. "Masalah Keamanan di Perbatasan Indonesia Papua New Guinea", dalam *Masalah-masalah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea*. Jakarta. Pusat Penkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretaris Jendral DPR.
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. 2009. "Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terdepan", dalam *Poiners Penjelasan MENKO POLHUKAM dalam Rangka Rapat Kerja dengan komisi I DPR RI*. Jakarta.

- Pospowardojo, Soejanto. 1993. "Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama", dalam *Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, ed. Oetojo Osman dan Alfian. Surabaya: Karya Anda.
- Reber, A. 1988. *Dictionary of Psychology*. Londn: Penguin Group.
- Riberu dkk. 1986. *Menguak Mitos-mitos Pembangunan : Telaah Etis dan Kritis*. Jakarta: Gramedia.
- Rozi, Syafuan, dkk. 2006. *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI.
- Salindeho, Winsulangi. Pitres Sombowadile. 2008. *Kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro: Daerah Perbatasan, Keterbatasan, Pembatasan*. Jogja: FuSpAD.
- Thompson, John B. 2004. *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*. Yogyakarta: Ircisod.
- Thompson, John B. 2004. *Analisis Ideologi: Kritik Wacana-wacana Ideologi Dunia*. Yogyakarta: Ircisod.
- Toha, Miftah. 2006. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Trijono, Lambang (ed.). 2004. *The Making of Ethnic and Religious Conflicts in Southeast Asia: Case and Resolutions*. Yogyakarta: CSPA Books.
- Trijono, Lambang, dkk. 2004. *Potret Letak Nusantara: studi Kasus Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: CSPA Books.
- Tower Sargent, Lyman. 1987. *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer : Sebuah Analisis Komparatif*. Jakarta: Erlangga.
- William Ebestein, William, dkk. 1994. *Isme Dewasa Ini*. Jakarta: Erlangga.
- Winangun, Y.W. Wartaya. 1990. *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner*. Yogyakarta: Kanisius.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010. dalam Buku III : Pembangunan Berdimensi Kewilayahan. Diperbanyak oleh (BAPPENAS).